

GUNTINGAN BERITA LINGKUNGAN HIDUP

Surat Kabar : Kompas

Tanggal : 07 Januari 2011

Subyek : Bencana Alam

Hal : 12

Penanganan Bencana Pengalaman Belum Menjadi Referensi

Jakarta, Kompas - Pengalaman penanganan berbagai jenis bencana tidak dikelola menjadi sebuah pengetahuan yang baik sehingga belum menjadi referensi dalam penanganan bencana berikutnya. Akibatnya, pemerintah selalu gagap menangani bencana.

Kritik itu disampaikan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Sultan Hamengku Buwono X di sela-sela diskusi "Hitam dan Putih Pengelolaan Bencana PascaLahirnya Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007" di Jakarta, Kamis (6/1).

"Bencana di Indonesia banyak. Kita perlu belajar dari proses (penanganan) bencana terdahulu, untuk dijadikan pengalaman dan referensi, sehingga pejabat memiliki prosedur operasi standar penanganan bencana. Dengan demikian, siapa pun penggantinya bisa melanjutkan, bukan belajar menangani bencana dari nol," kata Sultan.

Menurut dia, kegagalan itu dialami pemerintah dan pemerintah daerah. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana juga belum terimplementasi karena kelemahan pengaturan. Sultan mencontohkan, aturan syarat kepangkatan pemimpin Badan Penanggulangan Bencana Daerah yang hanya bisa dipenuhi oleh sekretaris daerah.

"Ketika radius zona bahaya Merapi menjadi 20 kilometer, pemerintah provinsi harus menghentikan semua proyek dan program di sana. Padahal, sebagian sudah berjalan. Penghentian berikut penyelesaian urusan administrasi terkait penggunaan anggaran hanya bisa diselesaikan sekretaris daerah. Jika dia terlibat menangani darurat bencana, urusan akan terbengkalai dan menjadi temuan Badan Pemeriksa Keuangan. Aturan kepangkatan harus diubah," katanya.

Menurut Sekjen Palang Merah Indonesia Budi Atmadi Adiputro, sejak tahun 1966 Indonesia telah menempatkan koordinasi menjadi kunci penanganan bencana. Melalui Keputusan Presiden Nomor 256 Tahun 1966, pemerintah mendirikan Badan Pertimbangan Penanggulangan Bencana Alam Pusat. Ia mengakui, koordinasi masih menjadi masalah. "Pengaturan soal badan pengarah pun sulit dilaksanakan di lapangan," kata Budi. Peneliti pada Sekolah Ekonomika Demokratik, Hendro Sangkoyo, menyatakan, penanggulangan bencana Indonesia terjebak dalam konsep yang sempit, statis, dan jemawa.

"Kita sering menyepelekan mata rantai peristiwa sebuah bencana. Penanggulangan bencana sangat teknokratis dan jemawa. Penanganan bencana seolah membutuhkan pita peresmian, penanganan, lalu penutupan. Diiringi oleh siklus anggaran yang statis tetapi tidak pernah menyentuh mata rantai peristiwa yang mendahului dan mengikuti bencana," kata Hendro.

Pelaku penanganan bencana, J Victor Rembeth, menyatakan, "Sudah ada tim reaksi cepat di Jakarta dan Malang, tetapi tidak berjalan efektif. Penanganan bencana harus berbasis masyarakat, masyarakat harus dibuat mampu mengelola risiko dan menangani bencana di daerahnya," kata Rembeth. (ROW)